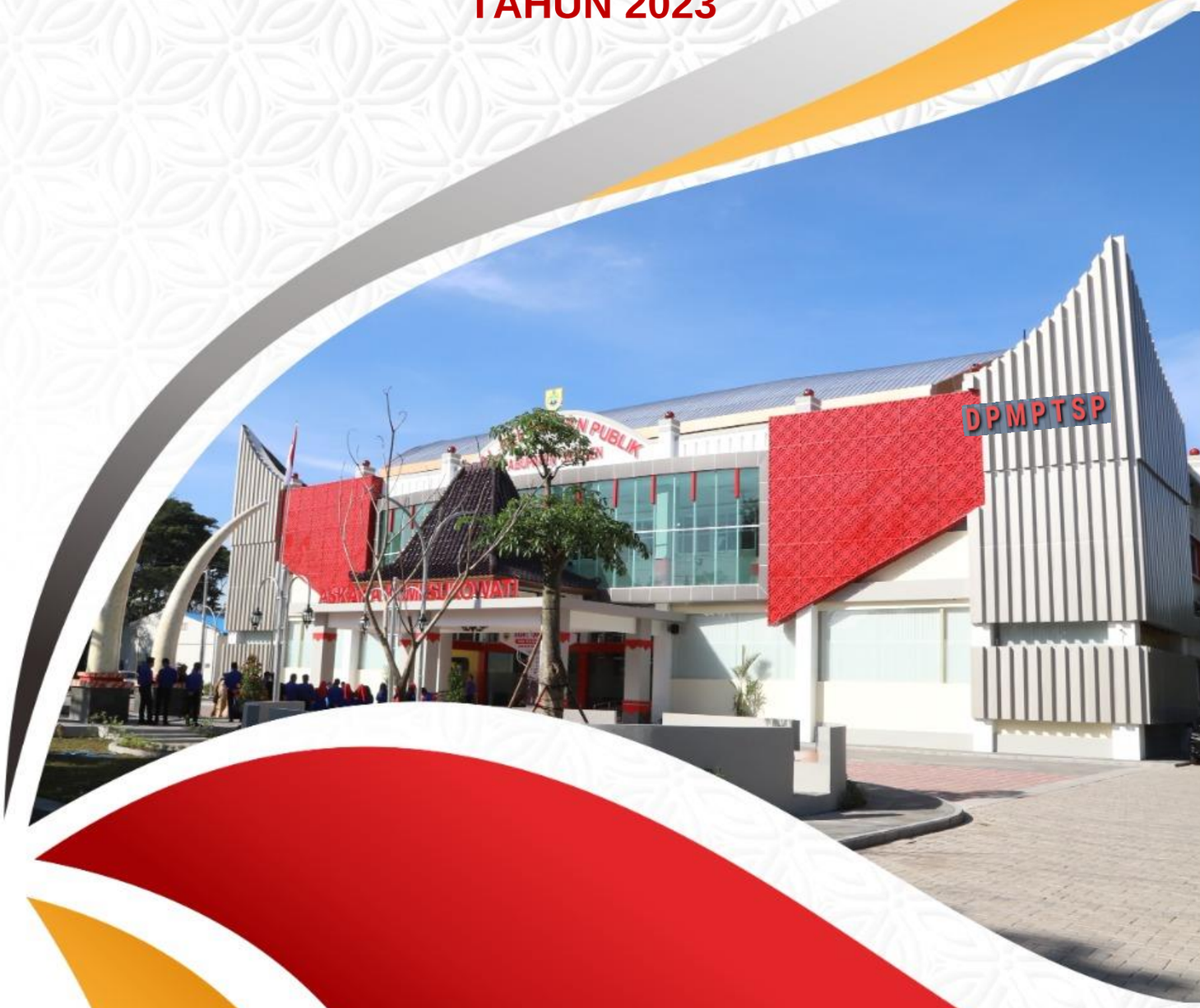
PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SRAGEN
ASKARA BUMI SUKOWATI
NYAWIJI MELAYANI BUMI SUKOWATI

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

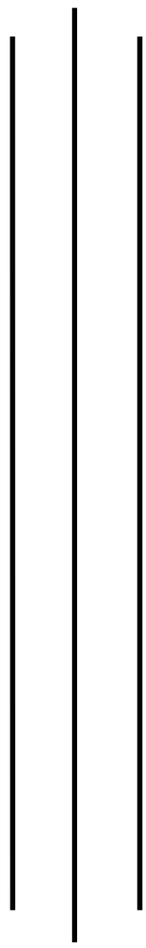
TAHUN 2023



DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Renja ini sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023. Dalam dokumen ini dijabarkan berbagai rencana program/ kegiatan yang telah disesuaikan guna mengakomodir tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah.

Semoga rencana kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.

Sragen, 09 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRI WULAN II
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Tri Wulan II 5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 12
BAB IV PENUTUP 22

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Evaluasi Renja Tahun 2023 s/d Tri Wulan II 6

Tabel III.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 13

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. dr. Soetomo No.5 Telp.0271-892348 (hunting), Fax 0271-894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/, E-mail dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N – 5 7 2 1 3

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050/1.181/18/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN NOMOR 800/405/29/2022 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 800/405/29/2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragenh Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 49).
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Sragen Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 800/405/29/2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 09 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,



DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun berjalan. Perubahan renja dapat dilaksanakan setelah penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023, maka Perangkat Daerah menyusun perubahan rencana kerja. Perubahan Renja 2023 ini memuat program/kegiatan/subkegiatan sebagai pedoman untuk memberikan arah pedoman terhadap semua program/kegiatan/subkegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tahun 2023. Perubahan Renja ini disusun berdasarkan kondisi pelayanan saat ini serta adanya perubahan asumsi tahun berjalan, sehingga nantinya rencana kerja yang disusun dapat tercapai dengan kondisi yang diharapkan. Perubahan Renja ini mengacu pada kondisi eksisting serta evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Tri Wulan II.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi perubahan renja disesuaikan dengan renstra.
2. Program/ kegiatan/ subkegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program/ kegiatan/subkegiatan yang direncanakan memuat target capaian indikator, kinerja *outcome* program, target dan indikator kinerja kegiatan/subkegiatan, dana yang diperlukan kegiatan.
4. Perubahan renja ini merupakan dokumen yang akan dilaksanakan dalam tahun berkenaan.

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan perubahan renja tahun 2023 didasarkan pada :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang dimutakhirkan terakhir melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).
k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9);
l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
p. Peraturan Bupati Sragen Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 49).
q. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21);

r. Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja DPMPTSP Tahun 2023 disusun dengan dimaksudkan:

1. mengakomodasi perubahan kondisi pada tahun 2023 yang berkaitan dengan program/kegiatan/subkegiatan;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2023 yang mencakup rencana capaian kinerja (target), untuk seluruh indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2023.

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja tahun 2023 sebagai berikut.

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2023;
2. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan rencana kerja tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan Latar Belakang

1.1 Landasan Hukum

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 Tri Wulan II

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 s/d Tri Wulan II

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu, pada tahun 2023 melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 36Subkegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 6.719.059.208 dengan realisasi anggaran sampai keadaan pada triwulan II sebesar Rp. 2.664.805.464 atau 39,66 %. Hal ini belum sesuai dengan rata-rata capaian tri wulanan, disebabkan terdapat beberapa kegiatan belum terealisasi keuangannya karena rencana penyelesaian kegiatan direncanakan pada triwulan III dan IV.

Tabel II.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan : Tri Wulan II

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Capaian	%
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp trilyun	1,55	1,18	76
2	Jumlah PMA PMDN	investor	1313	4967	378

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023	
										I		II			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
									Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)	116,67	0,00	154,60	0,00	0,00	0,00
									Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)	83,38		107,44		0,00	
									Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)	115,08		119,27		0,00	
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**37.222.101.000**		**4.230.008.480**		**6.726.054.208**		**973.794.739**		**2.664.805.464**		**39,62**
2.18		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**37.222.101.000**		**4.230.008.480**		**6.726.054.208**		**973.794.739**		**2.664.805.464**		**39,62**
2.18.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah [%]**	**100**	**29.636.301.000**	**0**	**4.180.690.480**	**100**	**5.371.335.708**	**25**	**924.476.739**	**50**	**2.402.302.864**	**100,00**	**44,72**
2.18.01.2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun [dokumen]	2	6.000.000	1	3.783.000	4	3.783.000	1	0	2	0	100,00	0,00
2.18.01.2,01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD [Laporan]	1	6.000.000	1	3.783.000	1	3.783.000	1	0	1	0	100,00	0,00
2.18.01.2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administraskeuangan perangkat daerah [bulan]	60	19.582.794.000	3	3.800.000.000	12	3.190.649.009	3	547.632.759	6	1.498.543.631	100,00	46,97

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
2.18.01.2,02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	125	19.582.794.000	25	3.800.000.000	25	3.190.649.009	24	547.632.759	24	1.498.543.631	96,00	0,00
2.18.01.2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah [laporan]	9	272.508.000	0	0	1	83.895.000	1	0	1	27.430.000	100,00	32,70
2.18.01.2,05.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan [Paket]	110	114.520.000	0	0	42	37.680.000	31	0	31	27.430.000	0,00	0,00
2.18.01.2,05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan [Orang]	110	157.988.000	0	0	40	46.215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.18.01.2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah [bulan]	60	3.503.699.000	0	81.341.092	12	550.920.000	3	81.278.092	6	195.671.836	100,00	35,52
2.18.01.2,06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	20	218.736.000	1	8.810.000	4	42.108.000	1	8.810.000	1	8.810.000	100,00	20,92
2.18.01.2,06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	32	1.352.430.000	2	25.870.000	6	219.230.000	2	25.807.000	4	74.966.000	200,00	0,00
2.18.01.2,06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	20	504.798.000	1	7.194.000	4	64.350.000	2	7.194.000	3	15.844.500	150,00	0,00
2.18.01.2,06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	20	738.852.000	1	22.675.400	3	111.615.000	1	22.675.400	3	40.705.400	300,00	0,00
2.18.01.2,06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan [Dokumen]	5	21.758.000	1	330.000	1	7.992.000	1	330.000	1	1.530.000	100,00	0,00
2.18.01.2,06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	120	490.000.000	5	8.261.692	25	75.000.000	11	8.261.692	23	38.265.936	191,67	0,00
2.18.01.2,06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD [Dokumen]	5	78.125.000	1	8.200.000	1	15.600.000	1	8.200.000	1	15.550.000	100,00	0,00
2.18.01.2,06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD [Dokumen]	4	99.000.000	0	0	1	15.025.000	0	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
2.18.01.2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah laporan pengadaan barang milik daerah [laporan]	9	1.234.223.000	0	0	2	192.261.000	0	0	2	114.886.000	200,00	59,76
2.18.01.2,07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan [Unit]	1	293.815.000	1	0	1	33.815.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.18.01.2,07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan [paket]	11	564.408.000	0	0	4	99.337.000	1	0	3	89.440.000	75,00	0,00
2.18.01.2,07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan [Unit]	57	376.000.000	0	0	5	59.109.000	0	0	3	25.446.000	60,00	0,00
2.18.01.2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah [bulan]	60	3.842.382.000	0	278.653.724	12	1.071.423.298	3	278.653.224	6	473.730.763	100,00	44,22
2.18.01.2,08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat [Laporan]	20	21.199.000	1	300.000	4	5.500.000	1	300.000	2	800.000	100,00	0,00
2.18.01.2,08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	20	1.733.444.000	1	97.427.224	4	471.272.000	1	97.427.224	2	193.823.763	100,00	0,00
2.18.01.2,08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	20	567.739.000	1	9.086.000	4	105.978.298	1	9.086.000	2	25.477.000	100,00	0,00
2.18.01.2,08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	20	1.520.000.000	1	171.840.500	4	488.673.000	1	171.840.000	2	253.630.000	100,00	0,00
2.18.01.2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah [laporan]	9	1.194.695.000	0	16.912.664	2	278.404.401	1	16.912.664	1	92.040.634	100,00	33,06
2.18.01.2,09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya [Unit]	43	389.000.000	1	5.725.000	3	54.150.000	2	5.725.000	3	18.924.640	100,00	0,00
2.18.01.2,09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	12	440.000.000	2	11.187.664	12	111.217.000	3	11.187.664	8	37.440.994	66,67	0,00

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
2.18.01.2,09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara [Unit]	131	87.564.000	0	0	56	18.521.000	0	0	5	0	20,83	0,00
2.18.01.2,09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara [Unit]	0	47.131.000	0	0	3	20.850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.18.01.2,09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	0	104.000.000	0	0	1	34.915.000	0	0	1	16.555.000	100,00	0,00
2.18.01.2,09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi [Unit]	128	127.000.000	0	0	31	38.751.401	0	0	19	19.120.000	118,75	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)										**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**44,72**
Predikat kinerja										**ST**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**
2.18.02		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun [%]**	**50**	**1.000.000.000**	**0**	**4.197.000**	**40**	**211.237.000**	**0**	**4.197.000**	**0**	**23.315.000**	**0,00**	**11,04**
2.18.02.2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	jumlah penyusunan peta potensi investasi [dokumen]	5	1.000.000.000	0	4.197.000	2	211.237.000	0	4.197.000	0	23.315.000	0,00	11,04
2.18.02.2,02.01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota [Dokumen]	4	500.000.000	0	0	1	88.839.000	0	0	0	8.335.500	0,00	0,00
2.18.02.2,02.02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota [Dokumen]	5	500.000.000	0	4.197.000	1	122.398.000	0	4.197.000	0	14.979.500	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,04**
Predikat kinerja										**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**
2.18.03		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/besar [%]**	**25**	**1.104.000.000**	**0**	**0**	**20**	**141.240.500**	**3**	**0**	**12.5**	**12.175.500**	**156,25**	**8,62**
2.18.03.2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah even promosi [kali]	10	1.104.000.000	0	0	2	141.240.500	0	0	0	12.175.500	0,00	8,62
2.18.03.2,01.02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota [Dokumen]	10	1.104.000.000	0	0	2	141.240.500	0	0	0	12.175.500	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)										**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**156,25**	**8,62**
Predikat kinerja										**STS**	**SR**	**STS**	**SR**	**STS**	**SR**
2.18.04		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan [poin]**	**84**	**2.735.927.000**	**0**	**35.143.500**	**83**	**507.849.000**	**90.5**	**35.143.500**	**91.25**	**138.181.600**	**109,94**	**27,21**

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
2.18.04.2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan [%]	100	2.735.927.000	0	35.143.500	100	507.849.000	100	35.143.500	100	138.181.600	100,00	27,21
2.18.04.2,01.01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik [Pelaku Usaha]	6225	912.334.000	300	13.388.000	1200	131.252.000	2409	13.388.000	5112	33.470.000	852,00	0,00
2.18.04.2,01.02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha]	2500	1.083.593.000	100	20.082.000	500	216.033.000	248	20.082.000	449	56.005.000	179,60	0,00
2.18.04.2,01.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan [Orang]	400	240.000.000	15	1.673.500	93	63.487.000	42	1.673.500	86	7.094.000	172,00	0,00
2.18.04.2,01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah [Kegiatan Usaha]	700	500.000.000	0	0	150	97.077.000	0	0	35	41.612.600	23,33	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,94**	**27,21**
Predikat kinerja										**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**STS**	**SR**
2.18.05		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM [%]**	**10**	**2.365.873.000**	**0**	**9.977.500**	**10**	**386.000.000**	**2**	**9.977.500**	**12.61**	**87.530.500**	**252,20**	**22,68**
2.18.05.2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal [%]	100	2.365.873.000	0	9.977.500	100	386.000.000	67	9.977.500	67	87.530.500	67,00	22,68

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
2.18.05.2,01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal [Kegiatan Usaha.]	300	459.000.000	0	0	60	54.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.18.05.2,01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal [Pelaku Usaha]	750	1.387.873.000	15	5.000.000	315	238.000.000	70	5.000.000	125	62.855.500	51,65	0,00
2.18.05.2,01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan [Kegiatan Usaha]	500	519.000.000	10	4.977.500	100	94.000.000	27	4.977.500	70	24.675.000	140,00	0,00
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**252,20**	**22,68**
									Predikat kinerja	**ST**	**SR**	**ST**	**SR**	**STS**	**SR**
2.18.06		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik [%]**	**60**	**380.000.000**	**0**	**0**	**30**	**108.392.000**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0,00**	**1,20**
2.18.06.2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/nonperizinan [%]	60	380.000.000	0	0	30	108.392.000	0	0	0	1.300.000	0,00	1,20
2.18.06.2,01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan [Dokumen]	6	380.000.000	0	0	1	108.392.000	0	0	0	1.300.000	0,00	0,00
									Rata-rata capaian kinerja (%)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**
									Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Sragen tahun 2023 dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran renja, visi dan misi Kabupaten Sragen yang tertuang dalam RKPD. Program kerja utama DPMPTSP Kabupaten Sragen sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Sragen adalah:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian dan Pelaksnaaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab DPMPTSP dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Dalam Perubahan Renja Tahun 2023 terdapat 6 program, 12 kegiatan, dan 36 subkegiatan baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian program/kegiatan, maka pada setiap dirumuskan indikator kinerja. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen dan sumber dana lainnya yang sah.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sesuai dengan usulan program/kegiatan/subkegiatan Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai berikut;

Tabel III.1
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	18				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**											**6,719,059,208**	**7,199,517,208**	
2	18	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,364,340,708**	**5,880,965,608**	
2	18	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**3,783,000**	**3,783,000**	
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase dokumen perencanaan dan evaluasi	Sragen	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	3,783,000	3,783,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											3,190,649,009	3,094,473,000	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase administrasi keuangan	Sragen	100 %	100 %	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	100 %	100 %	3,190,649,009	3,094,473,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											76,900,000	76,900,000	
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	persentase administrasi kepegawaian	Sragen	100 %	100 %	34 Paket	34 Paket	100 %	100 %	30,685,000	30,685,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	persentase administrasi kepegawaian	Sragen	100 %	100 %	0 Orang	0 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase administrasi kepegawaian	Sragen	100 %	100 %	40 Orang	40 Orang	100 %	100 %	46,215,000	46,215,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											550,920,000	982,290,620	
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	persentase administrasi umum perangkat daerah	Sragen	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	42,108,000	42,108,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase administrasi umum perangkat daerah	Sragen	100 %	100 %	6 Paket	8 Paket	100 %	100 %	219,230,000	631,275,620	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	persentase administrasi umum perangkat daerah	Sragen	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	64,350,000	64,350,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	persentase administrasi umum perangkat daerah	Sragen	100 %	100 %	3 Paket	4 Paket	100 %	100 %	111,615,000	105,865,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	persentase administrasi umum perangkat daerah	Sragen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	7,992,000	7,992,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase administrasi umum perangkat daerah	Sragen	100 %	100 %	25 Laporan	35 Laporan	100 %	100 %	75,000,000	115,100,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	persentase administrasi umum perangkat daerah	Sragen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	15,600,000	15,600,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase administrasi umum perangkat daerah	Sragen	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	15,025,000	0	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	18	1	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											192,261,000	349,571,000	
2	18	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	persentase pengadaan BMD	Sragen	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	33,815,000	33,815,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	persentase pengadaan BMD	Sragen	100 %	100 %	4 paket	6 paket	100 %	100 %	99,337,000	229,215,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	persentase pengadaan BMD	Sragen	100 %	100 %	5 Unit	15 Unit	100 %	100 %	59,109,000	86,541,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											1,071,423,298	1,024,807,298	
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Sragen	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	5,500,000	5,500,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Sragen	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	471,272,000	433,436,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Sragen	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	105,978,298	94,798,298	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Sragen	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	488,673,000	491,073,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											278,404,401	349,140,690	
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	persentase pemeliharaan BMD	Sragen	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	54,150,000	55,750,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	persentase pemeliharaan BMD	Sragen	100 %	100 %	12 Unit	12 Unit	100 %	100 %	111,217,000	109,789,409	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	18	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	persentase pemeliharaan BMD	Sragen	100 %	100 %	56 Unit	56 Unit	100 %	100 %	18,521,000	18,521,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	persentase pemeliharaan BMD	Sragen	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	20,850,000	20,850,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	persentase pemeliharaan BMD	Sragen	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	34,915,000	88,286,880	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	persentase pemeliharaan BMD	Sragen	100 %	100 %	31 Unit	31 Unit	100 %	100 %	38,751,401	55,943,401	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**											211,237,000	211,237,000	
2	18	2	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota**											211,237,000	211,237,000	
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	ketersediaan data potensi investasi	Sragen	40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	88,839,000	88,839,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	ketersediaan data potensi investasi	Sragen	40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	122,398,000	122,398,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	3			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**											141,240,500	134,104,100	
2	18	3	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											141,240,500	134,104,100	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	persentase even promosi	Sragen	20 %	20 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	141,240,500	134,104,100	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	4			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**											507,849,000	482,718,500	
2	18	4	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**											507,849,000	482,718,500	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	perizinan dan nonperizinan terlayani	Sragen	83 poin	83 poin	1200 Pelaku Usaha	1200 Pelaku Usaha	100 %	100 %	131,252,000	131,252,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	perizinan dan nonperizinan terlayani	Sragen	83 poin	83 poin	500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	100 %	100 %	216,033,000	216,033,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	perizinan dan nonperizinan terlayani	Sragen	83 poin	83 poin	93 Orang	93 Orang	100 %	100 %	63,487,000	38,356,500	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	perizinan dan nonperizinan terlayani	Sragen	83 poin	83 poin	150 Kegiatan Usaha	150 Kegiatan Usaha	100 %	100 %	97,077,000	97,077,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
2	18	5			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**											386,000,000	386,000,000	
2	18	5	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											386,000,000	386,000,000	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Sragen	10 %	10 %	60 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha.	100 %	100 %	54,000,000	0	DAK NONFISIK
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Sragen	10 %	10 %	315 Pelaku Usaha	375 Pelaku Usaha	100 %	100 %	238,000,000	292,000,000	DAK NONFISIK
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Sragen	10 %	10 %	100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	100 %	100 %	94,000,000	94,000,000	DAK NONFISIK

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	18	6			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**											108,392,000	104,492,000	
2	18	006	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											108,392,000	104,492,000	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	cakupan data informasi perizinan dan nonperizinan	Sragen	30 %	30 %	1 Dokumen	1 Dokumen	80 %	80 %	108,392,000	104,492,000	PENDAPATAN TRANSFER (DAU)
TOTAL																6,719,059,208	7,199,517,208	

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Renja ini disusun berisikan program/ kegiatan/ subkegiatan sebagai pedoman rencana kinerja untuk tahun 2023, sebagai tindak lanjut atas Perubahan RKPD Tahun 2023.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Perlu menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan petunjuk teknis.
2. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja, mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Perubahan Renja ini disusun dengan menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi renja. Besar harapan kami agar dokumen renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan ke depan.

Demikian Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2023 ini disusun dengan harapan semoga segala yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sragen, 09 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PM PTSP

DWI AGUS PRASETYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19791225 199810 1 001